



## SOAL DAYCARE TAK BERIZIN Gubernur DIY Instruksikan untuk Tutup

**YOGYA (KR)** - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan instruksi tegas untuk menyisir dan menutup seluruh operasional daycare yang belum mengantongi izin resmi. Arahan Gubernur itu dikemukakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, Erlina Hidayati Sumardi, Selasa (28/4)

Menurut Erlina, penegeasan Gubernur DIY itu, merupakan langkah preventif sekaligus penajaman pengawasan agar peristiwa seperti yang terjadi di Daycare Little Aresha tidak terulang kembali di wilayah DIY. Adapun langkah pertama yang akan dilakukan melakukan audit data terhadap daycare yang sudah terdaftar di Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota. Namun, fokus utama saat ini menyisir keberadaan lembaga serupa yang beroperasi tanpa izin.

**\* Bersambung hal 9 kol 5**

# Gubernur DIY ..... Sambungan hal 1

“Bapak Gubernur meminta agar daycare yang sudah beroperasi, namun belum berizin segera ditutup. Selain untuk mengantisipasi agar kasus serupa tidak terulang juga untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak,” ujar Erlina Hidayati se usai melakukan pertemuan dengan Gubernur DIY di Gedhong Wilis Kompleks Kepatihan.

Selain Erlina, pertemuan itu juga dihadiri Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti dan Walikota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Erlina mengungkapkan, selain melakukan penutupan daycare yang belum berizin. Pemda DIY tengah mengkaji urgensi penerbitan Surat Instruksi Gubernur yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota se-DIY. Hal ini dilakukan untuk menyamakan langkah dalam memperketat pengawasan di tingkat daerah.

Gubernur juga menekankan pentingnya pendalaman kualitas layanan melalui penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) yang lebih detail. SOP tersebut nantinya melengkapi aturan yang sudah ada, seperti standar akreditasi dan

regulasi Taman Asuh Ramah Anak (TARA) dari Kemen PPPA.

Mengenai kasus hukum yang tengah berjalan, Erlina memastikan, penanganan terhadap anak-anak yang menjadi korban serta orangtua mereka prioritas utama. Pemda DIY berkomitmen memberikan pendampingan seoptimal mungkin, baik dari sisi kesehatan fisik maupun psikis.

Walikota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan, berdasarkan pendataan terbaru, terdapat puluhan lembaga penitipan anak yang belum memenuhi legalitas khusus. Mayoritas dari lembaga tersebut menumpang pada izin institusi pendidikan yang sudah ada.

“Sampai hari ini total yang terdata sudah 68 daycare. Dari jumlah itu, yang resmi berizin ada 37, kemudian yang lainnya belum berizin. Tetapi yang lainnya itu banyak yang inklusi di TK dan PAUD. Artinya, lembaga ini adalah TK atau PAUD, terus membuka daycare. Harusnya TK-nya izin, PAUD-nya izin, dan daycare-nya pun harus izin,” terang Hasto. **(Ria)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 17 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005